



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA PEGAWAI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

Dibuat oleh:

Yudha Ikawira Subowo

022117207

yikawira@gmail.com

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**SEPTEMBER 2021**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA PEGAWAI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA,  
CCSA, CA, CSEP, QIA)



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA PEGAWAI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2019**

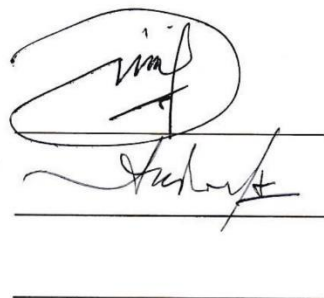
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021

Yudha Ikawira Subowo  
022117207

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)  
Ketua Komisi Pembimbing  
(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., CA., ME)  
Anggota Komisi Pembimbing  
(Mutia Puspa Widyowati, S.E., MAcc., Ak)



The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized, cursive signature that appears to be 'Ketut Sunarta'. The second signature is also cursive and appears to be 'Ahmad Burhanudin Taufiq'. Both signatures are written over horizontal lines.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
BELANJA PEGAWAI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
BELANJA MODAL DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2015-2019**

Skripsi

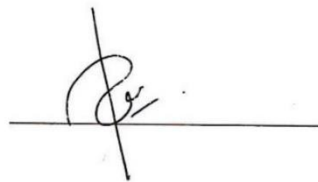
Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021

Yudha Ikawira Subowo

022117207

Disetujui,

Anggota Komisi Pembimbing  
(Mutiaras Puspa Widyowati, S.E., M.Acc., Ak)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Ikawira Subowo

NPM : 0221 17 207

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  
Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja  
Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat  
Periode 2015-2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 28 September 2021


Yudha Ikawira Subowo

0221 17 207

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun  
2021**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

YUDHA IKAWIRA SUBOWO, 022117207, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019. Di bawah Bimbingan : AHMAD BURHANUDIN TAUFIQ dan MUTIARA PUSPA WIDYOWATI,2021.

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh antar variabel dengan identifikasi masalah adanya kenaikan secara konstan terhadap variabel x tetapi variabel y mengalami fluktuasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji : 1. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap belanja modal, 2. Menguji pengaruh empat variabel independen secara bersama-sama terhadap belanja modal.

Jenis penelitian ini menggunakan verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Data penelitian terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal yang berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019, diperoleh dari situs resmi DJPK RI dan BPS. Populasi dalam penelitian ini semua kabupaten dan kota. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan taraf uji t, uji F dan  $R^2$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal sedangkan Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Kata kunci : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi, belanja modal

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019" dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan dengan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan waktu dan pikirannya dalam menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak dan tulus kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia, nikmat serta hidayah yang diberikan kepada penulis untuk penyusunan skripsi.
2. Ibu dan Ayah tersayang, terima kasih banyak untuk mendukung penyusunan skripsi serta selalu mendoakan dengan tulus setiap saat.
3. Kakak dan Sodara-Sodara tersayang yaitu Eka Prasti Wibiati dan Fitri Tut Wuri Handayani yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam perancangan skripsi.
4. Bapak Dr.Hendro Sasongko, AK., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto., AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEO., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
6. Bapak Ahmad Burhanudin Taufiq Ak.,CA.,ME Selaku Ketua Komisi Pembimbing, terima kasih atas segala waktu, tenaga, kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ibu Mutiara Puspa Widyowati S.E., M.Acc.,Ak Selaku Anggota Komisi Pembimbing, terima kasih telah mengarahkan, membimbing dan memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP Selaku Penguji Sempro, terima kasih atas saran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Ir. Zul Azhar, M.M. Selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan dalam menjalankan proses skripsi.
10. Bapak Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA Selaku Ketua Dosen Penguji Sidang yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi.
11. Ibu Siti Maimunah, SE, Msi., CPSP., CPMP., CAP Selaku Anggota Dosen Penguji Sidang yang telah memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi.



12. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, yang telah membekali berbagai pengalaman dan pengetahuan selama kuliah di Universitas Pakuan Bogor.
13. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pelaksanaan Universitas Pakuan, yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan,
14. Sahabat-sahabat Ku yaitu Muhamad Mufti Lutfi, Zulfahmi Rizki Rau Hsb, Redha Lamena, Ananda Nursyaf Al Fariz, Dias Tri Damara, Reza Putra Romadon dan Agil Maulana yang selalu memberikan motivasi dan pengaruh positif dalam penyusunan skripsi.
15. Teman-teman bimbingan seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
16. Kepada rekan-rekan Kelas E Angkatan 2017 yang telah bersama-sama menempuh studi di Universitas Pakuan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan dalam skripsi ini, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi Akuntansi khususnya jurusan Akuntansi Publik dan semua pihak yang berkepentingan.

Bogor, 28 September 2021

Penulis

Yudha Ikawira Subowo

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Maksud Penelitian .....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	5
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.5.1 Bagi Pemerintah .....	5
1.5.2 Bagi Masyarakat .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	6
2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	6
2.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah .....	6
2.2 Pengertian Dana Perimbangan .....	7
2.3 Pengertian Belanja Pegawai .....	7
2.4 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.5 Pengertian Belanja Modal .....	8
2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka pemikiran .....	9
2.6.1 Penelitian Sebelumnya .....	9
2.6.2 Kerangka Pemikiran .....	13
2.6.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal .....	13
2.6.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal .....	13
2.6.2.3 Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal .....	14
2.6.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal .....	14
2.6.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perim-	

bangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Terhadap Belanja Modal .....	14
2.7 Hipotesis Penelitian .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>17</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	17
3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	17
3.4 Operasionalisasi Variabel .....	18
3.5 Metode Penarikan Sampel .....	18
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	19
3.6.1 Dokumentasi .....	19
3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data .....	19
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	19
3.7.2 Uji Asumsi Klasik .....	19
3.7.2.1 Uji Normalitas .....	19
3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas .....	19
3.7.2.3 Uji Auto korelasi .....	19
3.7.2.4 Uji Multikolinieritas .....	20
3.7.3 Uji Hipotesis .....	20
3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	20
3.7.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	21
3.7.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .	21
3.7.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	22
3.7.3.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	22
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Hasil Pengumpulan data .....	23
4.1.1 Data Umum .....	23
4.1.2 Statistik Deskriptif .....	30
4.2 Analisis Data .....	32
4.2.1 Asumsi Klasik .....	32
4.2.1.1 Uji Normalitas .....	32
4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas .....	33
4.2.1.3 Uji Autokorelasi .....	34
4.2.1.4 Uji Multikolinieritas .....	35
4.3 Uji Hipotesis .....	35
4.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana .....	35
4.3.1.1 Uji Hipotesis Pertama .....	35
4.3.1.2 Uji Hipotesis Kedua .....	36
4.3.1.3 Uji Hipotesis Ketiga .....	37
4.3.1.4 Uji Hipotesis Keempat .....	38
4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda .....	39
4.3.2.1 Uji Hipotesis Kelima .....	39
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	41
4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal .....	41
4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	41

4.4.3 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal..	42
4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap belanja Modal .....	42
4.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Secara – Bersama – sama Terhadap Belanja Modal .....	43
4.5 Keterbatasan Penelitian .....	44
<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>45</b>
5.1 Simpulan .....	45
5.2 Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	48
LAMPIRAN.....	49

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data Laporan Realisasi APBD 2015-2019 .....	2
Tabel 1.2 : Data PRDB Provinsi Jawa Barat 2015-2019 .....	3
Tabel 2.1 : Ikhtisar Penelitian Sebelumnya .....	9
Tabel 3.4 : Operasionalisasi Variabel .....	18
Tabel 3.7 : Pengambil Keputusan Uji Durbin-Waston .....	20
Tabel 4.1 : Data Pendapatan Asli Daerah .....	24
Tabel 4.2 : Data Dana Perimbangan .....	25
Tabel 4.3 : Data Belanja Pegawai .....	26
Tabel 4.4 : Data Belanja Modal .....	28
Tabel 4.5 : Data Pertumbuhan Ekonomi .....	29
Tabel 4.6 : Statistik Deskriptif .....	31
Tabel 4.7 : Uji Hasil <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	33
Tabel 4.8 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	34
Tabel 4.9 : Hasil Uji Autokorelasi .....	34
Tabel 5.1 : Hasil Uji Multikolinieritas .....	35
Tabel 5.2 : Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel PAD.....	36
Tabel 5.3 : Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel DP .....	36
Tabel 5.4 : Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel BP.....	37
Tabel 5.5 : Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Pertumbuhan Ekonomi	38
Tabel 5.6 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	39

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran .....	15
Gambar 4.1 : Grafik Histogram Normalitas .....	32
Gambar 4.2 : Uji Normalitas dengan Normal P-Plot .....	33
Gambar 4.3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Belanja Modal.....	49
Lampiran 2 : Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan .....	55
Lampiran 3 : Hasil Analisis Regresi .....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kebijakan Otonomi daerah yang dirancang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi undang-undang Nomor 32 tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang mengahruskan bahwa daerah memiliki kewenangan otonomi untuk berkembang di segala bidang dan berinisiatif dalam perencanaan, pembangunan dan keuangan secara mandiri. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat dapat mudah untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya kedalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan DPRD sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun fiskal dan meningkatkan total aset atau aset organisasi sektor publik, yang mengakibatkan peningkatan anggaran operasional untuk biaya pemeliharannya (Nordiawan, 2010). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan jenis-jenis belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap dan lainnya / aset non lancar lainnya dan belanja modal aset lainnya. Pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa Belanja Modal ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan aset tetap. Alokasi Belanja Modal memiliki kepentingan pada kebutuhan daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas umum (Karyadi, 2017).

Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya dukungan dari faktor-faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktornya adalah keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang menjadi sumber finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (Karyadi, 2017).

Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat terus untuk melakukan perbaikan saran dan prasarana infrastruktur di kawasan beberapa Kabupaten tepatnya daerah terpencil. Tentunya harus diperlukan dengan anggaran belanja modal yang lebih besar untuk mendanai perbaikan dan pembangunan sarana



dan prasarana. Sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan anatara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi (Halim, 2012).

Meskipun Pemerintah Pusat mengurangi Dana Transfer terhadap APBD 2016 Jawa Barat tetapi hasilnya tetap relative positif karena DAK dan Dana Bagi Hasil pajak menambah seperti pajak bahan bakar kendaraan motor dan Pendapatan Asli Daerah meningkat disebabkan oleh Pajak Kendaraan bermotor. Sedangkan APBD Jawa Barat 2017 meningkatnya Pendapatan Daerah 13,9% dari tahun sebelumnya disebabkan oleh 28 ribu PNS baru yang berasal dari kabupaten/kota lalu DAU digunakan untuk gaji dan tunjangan lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut dalam tabel 1.1

Tabel 1.1  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah	32.191.204	34.660.152	41.400.148	40.240.462	44.150.909
Dana Perimbangan	38.847.842	55.178.058	58.739.502	58.963.356	62.347.586
Belanja Pegawai	34.994.069	37.545.083	40.194.584	41.429.289	42.591.302
Belanja Modal	17.859.908	19.959.613	18.525.802	17.845.532	19.634.115

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 yang berarti pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengelola daerahnya sendiri dapat berjalan dengan baik sehingga dana yang digunakan dapat membangun daerah itu sendiri, sedangkan Dana Perimbangan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2019 pada dana ini juga yang berarti pemerintah provinsi Jawa Barat masih membutuhkan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah itu sendiri agar dapat membiayai belanja. Selanjutnya Belanja Modal mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan penurunan pada tahun 2017 dan 2018 tetapi pada tahun 2019 meningkat lagi mendekati angka tahun 2016, Belanja Modal mengalami peningkatan berarti pemerintah provinsi Jawa Barat menjalankan

pembangunan infrastruktur dengan baik tetapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yang berarti pembangunan infrastruktur mengalami kendala.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2016). Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi (Todaro, 2006). Belanja modal berperan penting dalam meningkatkan infrastruktur publik dan berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi indeks belanja modal maka semakin tinggi pula dampak yang diharapkan terhadap perkembangan ekonomi daerah tersebut (BPS, 2015). Apabila secara data semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan bisa meningkatkan kualitas publik jadi dengan adanya tersebut, partisipasi publik dapat meningkat terhadap pembangunan (Mardiasmo, 2018).

Tabel 1.2  
Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2015-2019  
(Miliar Rupiah)

TAHUN	PDRB
2015	1.206.891,27
2016	1.277.312,17
2017	1.350.879,84
2018	1.430.710,19
2019	1.504.776,35

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Jawa Barat dari tahun 2015-2019 semakin meningkat yang artinya perekonomiannya berjalan dengan baik serta pembangan infrastruktur dapat menggerakkan sektor-sektor untuk berkontribusi di pertumbuhan ekonomi. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal pada tabel 1.2 diatas berarti pertumbuhan terus mengalami peningkatan tetapi tidak sejalan dengan data tabel 1.1 sehingga menimbulkan fenomena belanja modal yang digunakan infrastruktur tidak sejalan pertumbuhan ekonomi tepatnya pada PDRB ADHK. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi lalu Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri sedangkan Belanja Modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun fiskal dan meningkatkan total aset.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal yaitu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) menunjukkan bahwa variabel belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal, PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal

sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Selanjutnya menurut penelitian terdahulu dari Jannah, Wahono dan Salim (2017) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015) dan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Selanjutnya menurut penelitian terdahulu dari Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta dan hasil temuan menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka diambil judul penelitian yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019”.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Selama ini Belanja Modal terus mengalami penurunan di dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018.
2. Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang sesuai.
3. Data PAD, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, PDRB dan Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat antara tahun 2015-2019 menunjukkan bahwa adanya kenaikan PAD, Dana Perimbangan dan PDRB tetapi tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
4. Selama ini Belanja Pegawai terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan Belanja Modal.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan menganalisa tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019 sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?
5. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada keterkaitan dan pengaruh antar variabel yang akan diuji lalu menginformasikan hasil akhir dari penelitian serta memberikan saran yang dapat menghilangkan penyebab timbulnya permasalahan.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah dibangun. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.
2. Menguji pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal.
3. Menguji pengaruh belanja pegawai terhadap belanja modal.
4. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
5. Menguji pengaruh pendapat asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap belanja modal.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Bagi praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai cara untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada penelitian ini dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti kemudian lebih mengetahui variabel – variabel yang serupa.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan judul tersebut.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai tolak ukur kinerja yang akan datang sehingga meningkatkan kualitas akan kesungguhan menjalankan amanat dan menjalankan pekerjaan dengan baik lalu menjadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal penganggaran Belanja Modal.

#### **1.5.2 Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai *monitoring* atau pengawasan kinerja pemerintah sebagai pelaksana amanat dari rakyat sehingga mengedepankan kepentingan rakyat terutama tentang pengetahuan Belanja Modal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Definisi Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2012), yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah Menurut Rahman (2005), yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 yaitu :

“Dalam UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Seperti yang disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### **2.1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Adapun indikator pendapatan asli daerah sebagai berikut.

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pasal 6) bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
  - a. Hasil Pajak Daerah (HPD)
  - b. Retribusi Daerah (RD)
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS)
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
  - a. Sumbangan dari pemerintah
  - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan
  - c. Pendapatan lain-lain yang sah

Variabel Pendapatan Asli daerah diukur dengan rumus :

$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain – lain PAD yang Sah}$

## 2.2 Pengertian Dana Perimbangan

Menurut PP Nomor 55 tahun 2005 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana Perimbangan merupakan komponen pendapatan daerah yang penting. Banyak pemda yang masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah pendapatan asli daerah nya kurang mencukupi untuk mendanai anggaran belanjanya (Nordiawan, 2010).

Variabel Dana Perimbangan diukur dengan rumus :

$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}$  , dengan mengambil di Laporan Realisasi APBD dan *website* DPJK RI

## 2.3 Pengertian Belanja Pegawai

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Variabel Belanja Pegawai diukur dengan rumus :

$\text{Belanja Pegawai} = \text{Belanja Pegawai Langsung} + \text{Belanja Pegawai Tidak Langsung}$

## 2.4 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Adismita, pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk usaha peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (2013). Menurut penelitian terdahulu oleh Syahrullah (2014), PDRB dapat divisualisasikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu (Bank Indonesia). Secara teori, penghitungan PDRB dengan menggunakan ketiga metode yaitu Metode Pendekatan Produksi, Metode Pendekatan Pengeluaran dan Metode Pendekatan Pendapatan.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu : PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang berarti menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pada pertumbuhan ekonomi ini suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian penyajian dalam perhitungan ini berdasarkan harga konstan maka dapat dihitung. Variabel Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan PDRB rill dari tahun ke tahun.

## 2.5 Pengertian Belanja Modal

Definisi Belanja Modal menurut Halim (2012), yaitu :

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Definisi Belanja Modal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu :

Belanja Modal Merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang nantinya dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batas kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur dan harta tetap lainnya.

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima jenis, yaitu sebagai berikut.

1. **Belanja Modal Tanah**  
Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran biaya yang digunakann untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.
3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan Gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai Gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.
4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah biaya yang digunakan untuk penggantian/penambahan/peningkatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan sampai kondisi siap pakai.
5. **Belanja Modal Fisik/Aset Lainnya**  
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah biaya yang digunakan untuk perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal sebelumnya. Belanja Modal ini seperti belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

## 2.6 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Ikhtisar penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneltian ini adalah sebagai berikut dalam tabel 2.1

Tabel 2.1  
Ikhtisar penelitian sebelumnya

No.	Nama Peniti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Ernayani, 2017) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi	Variabel Independen : PAD ( $X_1$ ) DAU ( $X_2$ ) DAK ( $X_3$ ) DBH ( $X_4$ )	Diperoleh dari Dokumen APBD dan Laporan realisasi APBD	Regresi Linier Berganda	PAD : berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.  DAU dan DAK : berpengaruh terhadap Belanja Daerah.  PAD, DAU, DAK, DBH : secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di



	Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)	Variabel Dependen : Belanja Daerah ( $Y_i$ )			14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
2.	(Wiraswasta, Pudjihardjo dan Adis, 2018) dan Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan PAD.  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Laporan Realisasi Anggaran dan Data Laporan Perumbuhan Ekonomi dari BPS	Analisis deskriptif dan inferensial	Penelitian ini menemukan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan. Dana Perimbangan dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	(Nurdiwaty, Zaman dan Kristinawati, 2017) dan Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah  Variabel Dependen: Belanja Modal	-Rumus Belanja Modal Menurut PP No. 71 tahun 2010  -Rasio Pertumbuhan Ekonomi  -Rasio PAD  -Rasio DP	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
4.	(Jannah, Wahono dan Salim, 2017) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal  (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten	Variabel Independen : PAD, DAU dan DAK. Variabel Dependen adalah Belanja Modal.	Laporan Realisasi Anggaran yang didapatkan dari Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur	Statistik Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa  1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal;  2/ DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal;  PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun secara 10egativ-sama.

	Gresik Periode 2009–2015).				
5.	(Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu, 2016) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta	Variabel Independen : PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai.  Variabel Dependen : Belanja Modal	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008 – 2014 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kora Surakarta	-Statistik Deskriptif  -Uji Asumsi Klasik  -Analisis Regresi Linier Berganda	Belanja pegawai berpengaruh negative terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal
6	(Surakhman, Djazuli dan Choiriyah, 2019) dan Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang	Variabel Independen: DAU ( $X_1$ ), DAK ( $X_2$ ), PAD ( $X_3$ ).  Variabel Dependen : Belanja Modal ( $Y_1$ )	Laporan Pertanggung jawaban Walikota Palembang selama kurun waktu tahun 2008 – 2017 yang bersumber dari Bappeda, BPKAD dan Biro Pusat Statistik Kota Palembang.	Analisis Regresi	DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.  DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.  PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal  Secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
7	(Syukri dan Hinaya, 2019) dan Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )  PAD ( $X_2$ ) DAU ( $X_3$ ) DAK ( $X_4$ )  Variabel Dependen: Anggaran Belanja Modal ( $Y_1$ )	BPS Kota palopo dan BPS provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk rupiah yang kemudian dipersenkan masing-masing variabel.	-Analisis deskriptif  -Model regresi berganda  -Pengujian hipotesis  -Koefisien determinasi	Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), PAD( $X_2$ ) DAU( $X_3$ )  DAK( $X_4$ ) berpengaruh terhadap (Belanja Modal) $Y_1$ .  Secara parsial hanya PAD( $X_2$ ) yang berpengaruh signifikan terhadap (Belanja Modal) $Y_1$ sedangkan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), DAU( $X_3$ ), DAK( $X_4$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemajuan daerah ( $Y_1$ )
8	(Ayem dan Pratama, 2018) dan Pengaruh Pertumbuhan	Variabel Independen :	Belanja Modal = Belanja Tanah +	-Statistik Deskriptif	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

	Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016	Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ) dan PAD ( $X_4$ ).  Variabel Dependen :  Belanja Modal ( $Y_1$ )	Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Asset lainnya.  Pertumbuhan Ekonomi = $(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / (PDRB_{t-1}) \times 100\%$  PAD = HPD + RD + PLPD + LPS  DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar  DAK = Bobot Daerah + Bobot Teknis	-Pengujian hipotesis	DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.  PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.  Secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
9	(Karyadi, 2017) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014	Variabel Independen :  PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ).  Variabel Dependen :  Belanja Modal ( $Y_1$ )	Setiap variabel dapat dilihat dari posnya masing masing dalam Laporan Realisasi APBD	-Uji normalitas  -Uji Multikolinieritas  -Uji Heterokedastisitas  -Uji Autokorelasi  -Uji Hipotesis	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal  DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal  DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal  PAD, DAU dan Dak secara Bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal
10	(Dewi dan Suputra, 2017) dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan	Variabel Independen :  PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ) dan	Rumus Pertumbuhan Ekonomi, Rasio PAD, Rasio DAU, Rasio DAK dan Rasio	Regresi Linear Berganda	PAD berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi  DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi  DAK berpengaruh negative terhadap Pertumbuhan Ekonomi

	Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal ( $X_3$ ) Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	Belanja Modal		Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi
--	--	--	---------------	--	--

## 2.6.2 Kerangka Pemikiran

### 2.6.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah sehingga dapat digunakan pada belanja modal dalam bentuk infrastruktur (Tambunan, 2006). Menurut Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014 yang artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi.

### 2.6.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan salah satu sumber penyelenggaraan pembangunan daerah adalah melalui dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, bahwa pemerintah daerah tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya jika hanya mengandalkan pendapatannya sendiri. Semakin besar dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut PP Nomor 55 tahun 2005 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan adanya Dana perimbangan dapat memberikan dampak terhadap Belanja Modal seperti Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Nopiyanti dan Mintoyuwono (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

### **2.6.2.3 Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal**

Menurut UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI/Kepolisian. Menurut Penelitian Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal yang artinya jumlah pegawai pemerintah daerah yang besar merupakan pemicu membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, maka dana yang diperoleh lebih banyak untuk belanja pegawai. Oleh karena itu berdampak pada menurunnya alokasi belanja modal.

### **2.6.2.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Menurut penelitian terdahulu oleh Syahrullah (2014) PDRB dapat divisualisasikan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Menurut Penelitian Nurdiwaty, Zaman dan Kristinawati (2017), Pertumbuhan Ekonomi merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. Lalu hasil pengujiannya diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

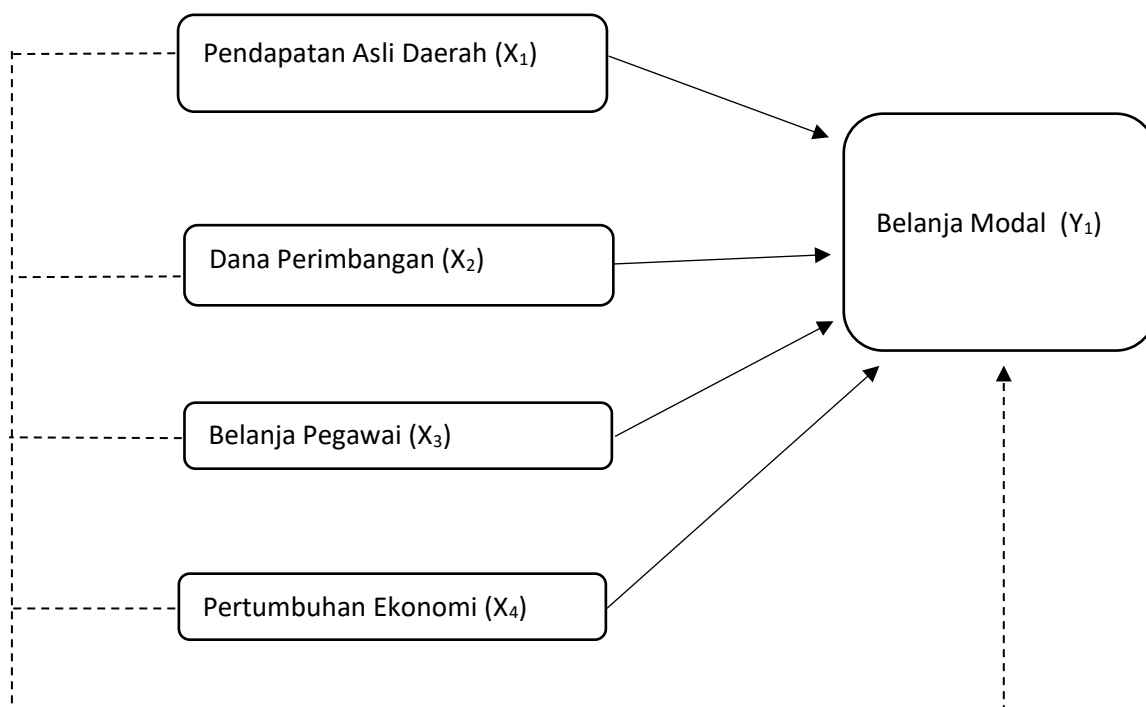
### **2.6.2.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal**

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal dari APBD. Belanja modal berfungsi untuk pengelolaan maupun penambahan asset daerah. Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah tersebut baik sarana maupun prasarana lalu digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah pada daerah tersebut. Karena sebagian besarnya anggaran Belanja Modal diperoleh dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah lalu Belanja Pegawai menjadi salah satu faktor keluarnya dana yang paling banyak untuk kebutuhan membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Kota Surakarta tahun 2008-2014 yang artinya tinggi rendahnya PAD berimplikasi pada besarnya alokasi. Lalu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah, Nopiyanti dan Mintoyuwono (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Menurut Penelitian terdahulu oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) bahwa belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal yang artinya jumlah pegawai pemerintah daerah yang besar merupakan pemicu

membengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, maka dana yang diperoleh lebih banyak untuk belanja pegawai. Oleh karena itu berdampak pada menurunnya alokasi belanja modal. Semua dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja pegawai terhadap belanja modal memiliki hubungan yang signifikan dan positif meskipun ada satu variabel yang negatif yaitu belanja pegawai.

Kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2017). Dari penjelasan di atas dan penelitian sebelumnya lalu didukung oleh teori-teori yang ada maka dapat di ambil judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019.



Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

**Ket :**

- ▶ Berpengaruh secara Parsial (Uji t)
- ▶ Berpengaruh secara bersama-sama (Uji F)

## 2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan hipotesis penelitian sebagai berikut :

**Hipotesis 1** : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019

**Hipotesis 2** : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019

**Hipotesis 3** : Belanja Pegawai berpengaruh terhadap negatif Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019

**Hipotesis 4** : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019

**Hipotesis 5** : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey* yang dimaksud adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) khususnya APBD (Anggaran pendapatan dan belanja daerah). Adapun yang menjadi objek penelitian adalah terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi lalu variabel dependen adalah Belanja Modal, sedangkan unit analisisnya adalah *geographic region*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2015-2019.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019 yang melalui dari *website* Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan *website* BPS Jawa Barat untuk memperoleh PDRB atas harga konstan yang sudah terpublikasi dan tersedia.

Sedangkan sumber data ini diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sumbernya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder dengan dokumen, catatan atau laporan realisasi APBD.

#### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrument penelitian dan juga untuk pengelolaan data selanjutnya. Operasionalisasi variabel merupakan bentuk operasionalisasi dari variabel – variabel yang digunakan, biasanya berisi dari indikator yang digunakan, ukuran serta skala setiap variabel ataupun sub variabel, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.4  
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (X <sub>1</sub> )	Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah	Total Pendapatan Asli Daerah dari Laporan Realisasi APBD.	Rasio
Dana Perimbangan (X <sub>2</sub> )	DAU + DAK + DBH	Total Dana Perimbangan dari Laporan Realisasi APBD.	Rasio
Belanja Pegawai (X <sub>3</sub> )	Belanja Pegawai Langsung + Belanja Pegawai Tidak Langsung	Jumlah Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Lansung yang di peroleh pada Laporan Realisasi APBD.	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>4</sub> )	PDRB rill Dari Tahun ke Tahun	Total PDRB Atas Harga Konstan diperoleh pada website BPS	Rasio
Belanja Modal (Y <sub>1</sub> )	Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya	Total Pendapatan Asli Daerah dari Laporan Realisasi APBD.	Rasio

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang meliputi 18 daerah Kabupaten dan 7 daerah Kota sehingga total populasi adalah 25 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut (Sugiyono, 2017) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2015-2019, dengan jumlah sampel sebanyak 25 daerah.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

#### 3.6.1 Dokumentasi

Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik tertulis maupun gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dikumpulkan adalah berupa dokumen – dokumen terkait Laporan Relalisasi APBD Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019 di *website* <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> dan untuk PDRB di ambil dari *website* BPS Jawa Barat yang sudah terpublikasi.

### 3.7 Metode Pengolahan/ Analisis Data

#### 3.7.1 Analisis Stastik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

#### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

##### 3.7.2.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi dengan baik secara normal. Dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). data dapat dikatakan normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

##### 3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastitas menggunakan *uji glejseri*. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yaitu :

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  kesimpulannya adalah data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

##### 3.7.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson*, apabila nilai DW lebih besar daripada batas atas, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, artinya tidak ada autokorelasi, bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya ada autokorelasi.

Guna mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi maka digunakan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi negative atau positif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber data : Ghozali, 2018

### 3.7.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas menurut Ghozali (2018), bertujuan untuk menguji bagaimana pada model regresi ditemukannya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas berarti bahwa antar variabel independen atau variabel dependen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama halnya dengan nilai  $VIF > 10$  maka model dikatakan terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika  $VIF < 10$  maka tidak terdapat multikolinieritas.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 3.7.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2017). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019 secara parsial. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

X = PAD atau DP atau BP atau Pertumbuhan Ekonomi

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

### 3.7.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah pengujian yang dilakukan oleh peneliti yang bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan naik/turun variabel dependen. Bila ada dua atau lebih variabel independent sebagai prediktor. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019 yang akan diuji dengan tingkat signifikansi dan secara bersama-sama. Persamaan yang dihasilkan dari hubungan antar variabel tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Modal

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah

X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan

X<sub>3</sub> : Belanja Pegawai

X<sub>4</sub> : Pertumbuhan Ekonomi

a : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  : Koefisien variabel independent

e : Kesalahan Residual

### 3.7.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka Hipotesis diterima, menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Begitu sebaliknya apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka Hipotesis ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

#### **3.7.3.4 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka disimpulkan bahwa semua variabel independent secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

#### **3.7.3.5 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted*  $R^2$  atau  $R^2$  pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol (0) dan satu (1), nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas, begitu pula sebaliknya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Hasil Pengumpulan Data**

##### **4.1.1 Data Umum**

Lokasi dari penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Jumlah populasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 25 Kabupaten dan Kota. Lalu, jumlah sampel Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 25 Kabupaten dan Kota, Sebagai berikut.

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Kab. Kuningan      | 14. Kab. Bogor       |
| 2. Kab. Majalengka    | 15. Kab. Garut       |
| 3. Kab. Purwakarta    | 16. Kab. Ciamis      |
| 4. Kab. Subang        | 17. Kab. Cirebon     |
| 5. Kab. Sukabumi      | 18. Kab. Indramayu   |
| 6. Kab. Sumedang      | 19. Kota Bandung     |
| 7. Kab. Tasikmalaya   | 20. Kota Bogor       |
| 8. Kab. Bandung Barat | 21. Kota Cirebon     |
| 9. Kab. Pangandaran   | 22. Kota Sukabumi    |
| 10. Kab. Bogor        | 23. Kota Tasikmalaya |
| 11. Kab. Cianjur      | 24. Kota Cimahi      |
| 12. Kab. Bekasi       | 25. Kota. Banjar     |
| 13. Kab. Karawang     |                      |

Data pada penelitian ini (N) sebanyak 125, data diperoleh dari laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019 yang seluruhnya didapatkan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2015-2019 dan untuk data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari BPS Jawa Barat yaitu PDRB Atas Harga Konstan selama 5 tahun.

##### **4.1.1.2 Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan digunakan untuk membangun daerahnya. Indikator pendapatan asli daerah didapat melalui Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah. Lalu diukur dengan total pendapatan asli daerah dari Laporan Realisasi Anggaran APBD. Berikut data pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1

Data pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

NO	KAB/KOTA	Pendapatan Asli Daerah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	229,170	229,170	384,398	303,218	301,403
2	Kab. Majalengka	283,735	283,735	513,783	449,974	439,843
3	Kab. Purwakarta	331,073	331,073	472,480	368,851	420,353
4	Kab. Subang	313,886	313,886	581,282	400,755	463,310
5	Kab. Sukabumi	509,484	509,484	799,499	565,369	619,788
6	Kab. Sumedang	327,369	327,369	553,257	432,181	463,538
7	Kab. Tasikmalaya	186,487	186,487	401,502	248,420	288,290
8	kab. Bandung Barat	314,621	314,621	609,916	422,341	528,087
9	Kab. Pangandaran	64,506	64,506	83,591	111,217	114,813
10	Kab. Bogor	2,002,209	2,002,209	3,041,872	2,794,660	3,161,165
11	Kab. Cianjur	454,627	454,627	535,232	569,844	628,558
12	Kab. Bekasi	1,843,836	1,843,836	2,311,805	2,094,369	2,439,368
13	Kab. Karawang	1,056,605	1,056,605	1,398,309	1,169,569	1,356,319
14	Kab. Bandung	784,216	784,216	936,905	927,543	1,025,354
15	Kab. Garut	419,201	419,201	692,255	421,299	486,565
16	Kab.Ciamis	180,304	180,304	223,076	234,610	264,280
17	Kab. Cirebon	478,690	478,690	779,337	584,810	638,421
18	Kab. Indramayu	346,871	346,871	577,594	419,892	450,063
19	Kota Bandung	1,859,694	1,859,694	2,578,457	2,571,591	2,548,258
20	Kota Bogor	627,597	627,597	978,197	912,197	1,015,884
21	Kota Cirebon	319,893	319,893	443,929	440,436	434,208
22	Kota Sukabumi	276,845	276,845	359,024	362,342	330,946
23	Kota Tasikmalaya	242,979	242,979	354,840	280,014	290,971
24	Kota Cimahi	268,807	268,807	383,911	335,016	360,955

25	Kota Banjar	119,829	119,829	125,454	116,167	100,745
----	-------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber : *website* DJPK RI, 2021

Pada tabel 4.1 menunjukkan terjadinya fluktuatif atau meningkat lalu menurun lagi pada pendapatan asli daerah di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2019, hal ini terjadi yang berarti dana PAD masih tidak mampu untuk menjalankan pembangunan di daerahnya sendiri serta kemandirian daerah dalam mengelolanya kurang tepat.

#### 4.1.1.3 Dana Perimbangan di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

Dana Perimbangan merupakan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah untuk membiayai daerah yang dana pendapatan asli daerahnya kurang sehingga dapat dibantu oleh pusat. Indikator dana perimbangan didapat melalui dana alokasi umum + dana alokasi khusus + dana bagi hasil yang semuanya menjadi dana perimbangan. Berikut data dana perimbangan di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.2

Data dana perimbangan di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

NO	KAB/KOTA	Dana Perimbangan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	1,374,529	1,717,086	1,721,906	1,662,033	1,740,991
2	Kab. Majalengka	1,367,195	1,723,842	1,689,901	1,668,010	1,672,256
3	Kab. Purwakarta	923,601	1,076,034	1,097,350	1,220,987	1,254,756
4	Kab. Subang	1,450,713	1,833,458	1,846,205	1,867,788	1,919,000
5	Kab. Sukabumi	1,777,394	2,210,394	1,949,722	1,964,152	2,465,721
6	Kab. Sumedang	1,269,358	1,611,297	1,594,548	1,638,676	1,742,184
7	Kab. Tasikmalaya	1,633,950	2,079,587	2,083,179	2,067,009	2,160,615
8	kab. Bandung Barat	1,159,888	1,464,280	1,587,392	1,525,369	1,639,819
9	Kab. Pangandaran	619,657	698,289	811,595	787,754	864,020
10	Kab. Bogor	2,583,489	2,692,167	2,742,839	2,818,814	3,094,445
11	Kab. Cianjur	1,729,841	2,155,472	2,201,273	2,246,193	2,261,839
12	Kab. Bekasi	1,620,066	1,932,029	1,848,535	1,903,321	1,892,760
13	Kab. Karawang	1,623,936	1,959,377	2,017,808	2,048,785	2,138,791



14	Kab. Bandung	2,310,509	2,992,229	3,009,662	3,137,666	3,374,888
15	Kab. Garut	2,044,981	2,470,089	2,659,109	2,625,652	2,843,353
16	Kab. Ciamis	1,342,252	1,413,401	1,714,552	1,627,548	1,793,455
17	Kab. Cirebon	1,691,675	2,158,779	2,074,515	1,709,528	2,193,871
18	Kab. Indramayu	1,678,667	2,066,811	1,969,934	1,988,742	2,115,229
19	Kota Bandung	1,765,831	2,443,767	2,290,752	2,427,237	2,484,080
20	Kota Bogor	814,953	1,097,615	1,072,486	1,066,762	1,106,494
21	Kota Cirebon	773,113	870,838	819,338	814,145	803,587
22	Kota Sukabumi	571,878	702,120	699,677	688,216	709,268
23	Kota Tasikmalaya	849,187	1,077,545	1,114,721	1,145,172	1,140,745
24	Kota Cimahi	628,232	783,781	820,783	788,025	801,160
25	Kota Banjar	428,013	559,043	522,718	505,143	504,625

Sumber : *website* DJPK RI, 2021

Pada tabel 4.2 menunjukkan terjadinya fluktuatif atau meningkat lalu menurun lagi pada dana perimbangan di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2019, hal ini berarti dana perimbangan pada kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan dana yang ditransfer dari pusat ke daerahnya masih banyak daerah-daerah yang kurang menghasilkan pendapatannya sendiri sedangkan pada kabupaten dan kota yang mengalami penurunan berarti dana yang ditransfer dari pusat ke daerahnya sudah mampu mengelolanya.

#### 4.1.1.4 Belanja Pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

Belanja pegawai merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai uang gaji PNS, TNI serta uang pesiunan. Indikator belanja pegawai yang digunakan yaitu diambil dari laporan realisasi anggaran APBD dengan mengambil belanja pegawai langsung + belanja pegawai tidak langsung. Berikut data belanja pegawai di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.3

Data Belanja Pegawai di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

NO	KAB/KOTA	Belanja Pegawai				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	1,271,597	1,315,360	1,210,028	1,230,735	1,258,919

2	Kab. Majalengka	1,254,517	1,338,450	1,246,980	1,278,366	1,254,285
3	Kab. Purwakarta	826,887	815,111	935,608	978,173	1,009,252
4	Kab. Subang	1,242,451	1,315,630	1,367,985	1,398,230	1,427,018
5	Kab. Sukabumi	1,454,191	1,367,370	1,243,626	1,360,714	1,404,959
6	Kab. Sumedang	1,155,726	1,280,720	1,120,921	1,207,726	1,237,660
7	Kab. Tasikmalaya	1,458,775	1,533,400	1,462,994	1,458,786	1,495,827
8	kab. Bandung Barat	971,787	1,013,750	1,088,943	1,137,466	1,337,528
9	Kab. Pangandaran	384,830	422,754	421,912	424,858	420,161
10	Kab. Bogor	2,266,711	2,530,400	2,432,862	2,590,630	2,683,322
11	Kab. Cianjur	1,359,194	1,477,770	1,441,861	1,419,095	1,484,897
12	Kab. Bekasi	1,481,942	1,729,850	1,596,795	1,838,786	1,914,993
13	Kab. Karawang	1,518,446	1,619,920	1,622,374	1,621,732	1,710,536
14	Kab. Bandung	2,006,100	569,468	2,012,342	2,030,950	2,415,428
15	Kab. Garut	1,859,584	1,799,580	1,893,957	1,814,192	1,794,273
16	Kab. Ciamis	1,149,473	1,114,680	1,076,967	1,167,699	1,106,301
17	Kab. Cirebon	1,636,708	1,687,840	1,626,858	1,481,625	1,525,115
18	Kab. Indramayu	1,322,053	1,353,900	1,310,288	1,241,961	1,297,129
19	Kota Bandung	2,381,935	2,540,340	2,337,929	2,537,507	2,535,338
20	Kota Bogor	956,968	1,044,030	1,030,115	1,108,690	1,181,889
21	Kota Cirebon	645,708	663,015	632,947	625,694	660,622
22	Kota Sukabumi	514,593	538,639	469,627	502,263	539,665
23	Kota Tasikmalaya	764,933	802,727	819,612	789,805	800,475
24	Kota Cimahi	601,514	648,444	596,846	659,050	668,364
25	Kota Banjar	267,708	342,652	279,670	286,308	298,547

Sumber : *website DJPK RI*, 20217

Pada tabel 4.3 menunjukkan terjadinya menurun pada belanja pegawai di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2019, hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak mengeluarkan biaya belanja pegawai karena Provinsi Jawa Barat juga salah satu faktor Provinsi terbesar di Indonesia.

#### 4.1.1.5 Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

Belanja Modal merupakan belanja yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Indikator dalam menghitung belanja modal yaitu Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya. Belanja modal memiliki fungsinya salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Berikut data Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.4

Data Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019

NO	KAB/KOTA	Belanja Modal				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	393,510	328,557	327,877	221,662	251,909
2	Kab. Majalengka	672,132	631,758	605,772	681,604	643,663
3	Kab. Purwakarta	357,890	284,796	416,588	228,163	329,288
4	Kab. Subang	479,480	524,266	486,430	486,207	458,838
5	Kab. Sukabumi	508,051	551,261	545,840	614,381	603,785
6	Kab. Sumedang	557,223	465,362	498,572	410,348	605,698
7	Kab. Tasikmalaya	462,706	737,110	566,130	524,842	636,907
8	kab. Bandung Barat	374,320	355,712	400,093	264,540	338,001
9	Kab. Pangandaran	265,369	220,657	426,921	284,898	499,054
10	Kab. Bogor	1,459,647	1,541,830	1,525,152	1,313,835	1,567,693
11	Kab. Cianjur	581,323	616,245	823,214	928,610	690,653
12	Kab. Bekasi	1,165,153	1,302,250	971,090	853,621	954,900
13	Kab. Karawang	631,019	574,175	745,196	697,603	703,203
14	Kab. Bandung	708,464	569,468	628,497	713,093	1,088,249
15	Kab. Garut	578,732	597,238	615,046	537,593	553,083
16	Kab. Cianjur	492,668	549,753	452,171	442,374	520,316
17	Kab. Cirebon	439,768	610,530	609,568	510,923	587,833
18	Kab. Indramayu	713,948	937,844	776,090	769,879	982,685

19	Kota Bandung	1,287,802	1,254,020	918,875	1,049,696	1,179,429
20	Kota Bogor	440,919	552,485	433,491	455,461	500,976
21	Kota Cirebon	264,561	297,984	220,222	175,692	269,915
22	Kota Sukabumi	166,212	205,502	217,077	140,100	192,377
23	Kota Tasikmalaya	319,080	387,626	425,367	374,596	445,498
24	Kota Cimahi	180,783	275,140	270,324	276,020	260,337
25	Kota Banjar	194,774	281,994	215,242	193,782	208,991

Sumber : *website DJPK RI*, 2021

Pada tabel 4.4 menunjukkan terjadinya fluktuatif pada belanja modal di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2019, hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat banyak mengeluarkan biaya belanja modal seperti pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, dll karena Provinsi Jawa Barat juga salah satu faktor Provinsi terbesar di Indonesia.

#### **4.1.1.6 Pertumbuhan Ekonomi di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019**

Tabel 4.5

Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015 - 2019

(dalam rupiah)

NO	KAB/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	12.483.854	13.163.159	13.917.436	14.724.987	15.599.976
2	Kab. Majalengka	14.035.024	14.807.856	15.740.215	16.622.647	17.724.742
3	Kab. Purwakarta	41.123.153	43.068.353	44.776.467	46.511.036	48.071.784
4	Kab. Subang	15.494.277	16.155.833	16.800.362	17.353.374	17.904.497
5	Kab. Sukabumi	15.308.903	16.136.280	17.002.756	17.935.085	18.922.738
6	Kab. Sumedang	16.662.979	17.537.667	18.559.008	19.581.739	20.773.420
7	Kab. Tasikmalaya	11.326.330	11.952.639	12.626.945	13.315.811	14.016.644
8	kab. Bandung Barat	15.641.224	16.334.681	16.999.613	17.751.792	18.470.749
9	Kab. Pangandaran	16.059.844	16.808.674	17.564.343	18.417.681	19.412.058
10	Kab. Bogor	22.801.199	23.581.738	24.420.163	25.373.346	26.296.550
11	Kab. Cianjur	11.298.226	11.986.515	12.646.961	13.411.220	14.128.884

12	Kab. Bekasi	63.447.187	64.041.564	65.200.600	66.636.076	66.965.638
13	Kab. Karawang	58.257.737	61.471.770	64.044.528	67.363.090	69.563.075
14	Kab. Bandung	18.307.706	19.130.404	19.969.224	20.877.715	21.809.417
15	Kab. Garut	12.523.549	13.155.662	13.699.157	14.281.948	14.907.060
16	Kab.Ciamis	15.213.645	16.032.967	16.774.168	17.587.559	18.431.492
17	Kab. Cirebon	12.979.272	13.602.112	14.180.233	14.778.054	15.378.654
18	Kab. Indramayu	33.501.105	33.340.594	33.634.627	33.904.384	34.802.101
19	Kota Bandung	60.278.963	64.733.963	69.197.859	73.924.026	78.808.426
20	Kota Bogor	24.141.686	25.361.680	26.507.616	27.728.664	29.000.138
21	Kota Cirebon	43.152.853	45.338.748	47.532.558	50.012.015	52.653.543
22	Kota Sukabumi	21.958.378	22.982.095	24.029.373	25.158.551	26.346.398
23	Kota Tasikmalaya	18.815.295	20.050.224	21.209.346	22.421.476	23.731.278
24	Kota Cimahi	30.475.708	31.787.016	33.117.890	34.867.095	36.857.695
25	Kota Banjar	14.464.582	15.243.679	16.008.313	16.775.233	17.589.170

Sumber : BPS Jawa Barat, 2021

Pada tabel 4.5 menunjukkan terjadinya fluktuatif pada PDRB atas harga konstan di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2015-2019, hal ini berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang naik dan turun karena Provinsi Jawa Barat juga salah satu faktor Provinsi terbesar di Indonesia.

#### 4.1.2 Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini terdapat empat data yaitu tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Data tersebut terlampir dalam lampiran I dan II. Untuk mendeskripsikan data menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang akan disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi.

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2019, maka nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel penelitian Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif  
(dalam jutaan rupiah)

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	125	64.506	3.161.165	686.065,16	688.395,988
Dana Perimbangan	125	428.013	3.374.888	1.635.547,34	678.186,094
Belanja Pegawai	125	267.708	2.683.322	1.268.429,78	570.750,730
Pertumbuhan Ekonomi	125	11.298.226	78.808.426	27.113.592,35	17.286.284,059
Belanja Modal	125	140.100	1.567.693	565.541,97	315.328,603
Valid N	125				

Sumber : data sekunder yang diolah

a. Pendapatan Asli Daerah

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran III) dengan bantuan *program IBM SPSS statistic Version 25*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 125. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp. 64.506 diperoleh dari Kabupaten Pengandaran pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp 3.161.165 diperoleh dari Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Nilai standar deviasi 688.395,988 dan nilai rata-rata (*mean*) Rp 686.065,16 artinya data bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar daripada *mean*.

b. Dana Perimbangan

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran III) dengan bantuan *program IBM SPSS statistic Version 25*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 125. Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai minimal sebesar Rp 428.013 diperoleh dari Kota Banjar pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp 3.374.888 diperoleh dari Kabupaten Bandung pada tahun 2019. Nilai standar deviasi 678.186,094 dan mean Rp 1.635.547,34 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada mean.

c. Belanja Pegawai

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran III) dengan bantuan *program IBM SPSS statistic Version 25*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 125. Variabel Belanja Pegawai mempunyai nilai minimal sebesar Rp 267.708 diperoleh dari Kota Banjar pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp 2.683.322 diperoleh dari Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Nilai mean Rp 1.268.429,78 dan nilai standar deviasi 570.750,730 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada mean.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran III) dengan bantuan *program IBM SPSS statistic version 25*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 125. Variabel Pertumbuhan Ekonomi mempunyai nilai minimal sebesar Rp 11.298.226 diperoleh dari Kabupaten Cianjur pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar Rp 78.808.426 diperoleh dari Kota Bandung pada tahun 2019. Nilai *mean* Rp

27.113.592,35 dan nilai standar deviasi 17.286.284,06. artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada *mean*.

e. Belanja Modal

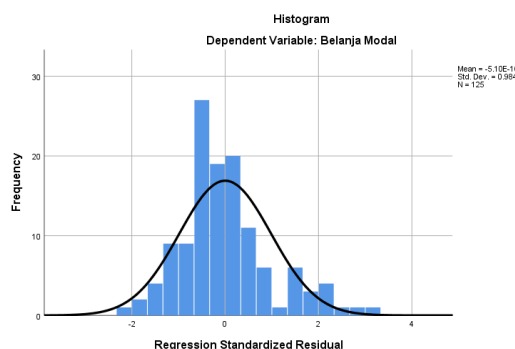
Melalui hasil dari tahap pemrosesan pengolahan data (data terlampir pada lampiran III) dengan bantuan *program IBM SPSS statistic Version 25*. Jumlah populasi yang diteliti yaitu sejumlah 125. Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimal sebesar Rp 140.100 diperoleh dari Kota Sukabumi pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.567.693 diperoleh dari Kabupaten Bogor pada tahun 2019. Nilai mean Rp 565.541,97 dan nilai standar deviasi 315.328,603 artinya data kurang bervariasi karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada *mean*.

## 4.2 Analisis Data

### 4.2.1 Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.1.1 Uji Normalitas

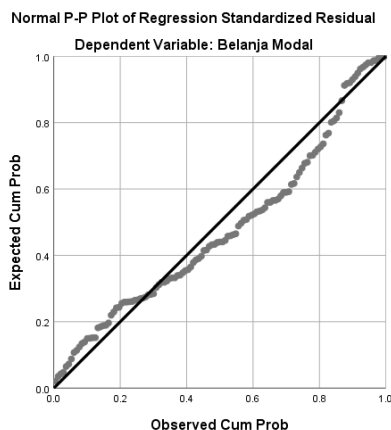
Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dari hasil pengumpulan data berupa data sekunder yang dilakukan uji normalitas, berikut grafik histogram.



Gambar 4.1 Grafik Histogram Normalitas

Sumber : data sekunder yang diolah.

Terlihat dari tampilan grafik histogram normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa histogram menunjukkan pola distribusi normal. Namun jika hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih tepat adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan *ploting* data residul akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residul normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan *normal probability plot* dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Normal P-Plot  
Sumber : data sekunder yang diolah.

Pada grafik *normal probability plot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar tidak berhimpit di sekitar garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dicapai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih dari 0,05. Adapun uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

<i>Test of Normality</i>			
Variabel	<i>Kolmogorov-Sminov</i>		
	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig</i>
Pendapatan Asli Daerah	0,272	125	0,000
Dana Perimbangan	0,086	125	0,023
Belanja Pegawai	0,081	125	0,042
Pertumbuhan Ekonomi	0,220	125	0,000
Belanja Modal	0,146	125	0,000

Sumber : data sekunder yang diolah.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas dengan lima variabel. Nilai Kolmogorov-Smirnov signifikansi pada semua variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal kurang dari 0,05 yang berarti variabel tersebut dikatakan tidak normal.

#### 4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan *uji glejseri*. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas yaitu :

- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  kesimpulannya adalah data tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.



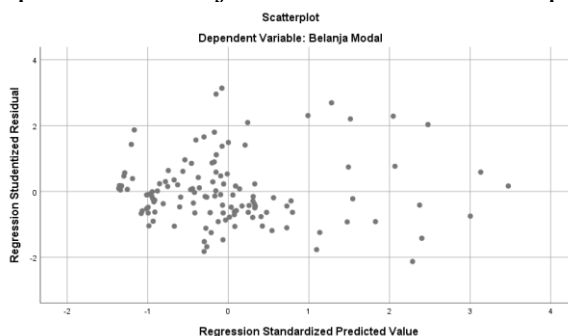
Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh hasil berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Pendapatan Asli Daerah	0,000
Dana Perimbangan	0,028
Belanja Pegawai	0,026
Pertumbuhan Ekonomi	0,176

Sumber : data sekunder yang diolah.

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja pegawai kurang dari 0,05 yang berarti terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 0,05 yang berarti data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Lalu kita juga bisa meninterpretasikan bahwa apabila titik-titik berjauhan dari nol maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas seperti gambar dibawah.



Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

#### 4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji Durbin-Watson (D-W).

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,895 <sup>a</sup>	0,801	0,794	143003,016	2,272

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data sekunder yang diolah.

Dengan nilai table pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (N) 125 dan jumlah variabel independent 4 ( $k = 4$ ), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7745 dan batas bawah (dL) 1,6426. Karena nilai DW 2,272 lebih kecil dari 4-dL yaitu 2,3574, maka tidak ada kesimpulan autokorelasi dalam model regresi ini.

$$4-dL = 4 - 1,6426 = 2,3574$$

$$4-dU = 4 - 1,7745 = 2,2255$$

#### 4.2.1.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonierita digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya kemiripan antar variabel dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Nilai VIF dan

Tolerance, kedua ini adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadi interkorelasi variabel bebas. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai  $VIF \leq 10$  atau nilai tolerance  $\geq 0,01$  dan apabila nilai  $VIF \geq 10$  atau nilai tolerance  $\leq 0,01$  maka terjadi multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan SPSS versi 25 :

Tabel 5.1 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pendapatan Asli Daerah	0,260	3,839
Dana Perimbangan	0,198	5,046
Belanja Pegawai	0,131	7,627
Pertumbuhan Ekonomi	0,527	1,896

Sumber : data sekunder yang diolah.

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai nilai VIF dari keempat variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi diatas lebih kecil dari 10 dan untuk nilai Tolerance dari keempat variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi diatas lebih dari 0,01. Maka menurut hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

### 4.3 Uji Hipotesis

#### 4.3.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

##### 4.3.1.1 Uji Hipotesis Pertama

Melalui bantuan *software IBM SPSS Statistic Version 25* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Koefisien Regresi	$r_{xy}$	$r^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	307.437,729			0,000	13,452	
PAD ( $X_1$ )	0,376	0,821	0,675	0,000	15,967	Signifikan

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.2 ditulis persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 307.437,729 + 0,376X_1$$

Nilai konstanta sebesar 307.437,729, hal ini bermakna bahwa Belanja Modal akan sebesar 307.437,729 jika Pendapatan Asli Daerah sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,376, menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,376 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal ( $Y$ ), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,821. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,675 yang berarti 67,5% memiliki nilai pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel independent Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain dan faktor lain selain Pendapatan Asli Daerah. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  15,967 >  $t_{tabel}$  1,980 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) signifikan terhadap Belanja Modal ( $Y$ ).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019” dapat diterima.

#### 4.3.1.2 Uji Hipotesis Kedua

Melalui bantuan *software IBM SPSS statistic version 25* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Perimbangan

Variabel	Koefisien Regresi	$R_{xy}$	$R^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	13.014,733			0,799	0,255	
Dana Perimbangan ( $X_2$ )	0,338	0,727	0,528	0,000	11,728	Signifikan

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.3 maka persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 13.014,733 + 1,563X_2$$

Nilai konstanta sebesar 13.014,733, hal ini bermakna bahwa Belanja Modal akan sebesar 13.014,733 jika Dana Perimbangan sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,338, menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,338 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Dana perimbangan ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal ( $Y$ ), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,727 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,528 yang berarti 52,8% memiliki nilai pada variabel independen Dana Perimbangan, sedangkan sisanya 47,2% dipengaruhi oleh variabel lain dan faktor lain selain Dana Perimbangan. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  11,728 >  $t_{tabel}$  1,980 menunjukkan bahwa Dana Perimbangan ( $X_2$ ) signifikan terhadap Belanja Modal ( $Y$ ). Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Dana Perimbangan akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan “Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019” dapat diterima.

#### 4.3.1.3 Uji Hipotesis Ketiga

Melalui bantuan *software IBM SPSS statistic version 25* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Belanja Pegawai

Variabel	Koefisien Regresi	$R_{xy}$	$R^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	-20.536,724			0,589	-0,541	
Belanja Pegawai ( $X_3$ )	0,462	0,836	0,699	0,000	16,918	Signifikan

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.4 maka persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = -20.536,724 + 0,426X_3$$

Nilai konstanta sebesar -20.536,724, hal ini bermakna bahwa Belanja Modal akan sebesar -20.536,724 jika Belanja Pegawai sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,426, menunjukkan bahwa apabila Belanja Pegawai meningkat sebesar 1

persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,426 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Belanja Pegawai ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Modal ( $Y$ ) meskipun nilai konstanta ( $a$ ) -20.536,724 dengan ditunjukkannya angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,836 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,699 yang berarti 69,9% memiliki nilai pada variabel independen Belanja Pegawai, sedangkan sisannya 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain dan faktor lain selain Belanja Pegawai. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  16,918 >  $t_{tabel}$  1,980 menunjukkan bahwa Belanja Pegawai ( $X_3$ ) signifikan terhadap Belanja Modal ( $Y$ ).

Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal adalah negatif tetapi signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Belanja Pegawai maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya apabila semakin rendah Belanja Pegawai akan semakin rendah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019” diterima.

#### 4.3.1.4 Uji Hipotesis Keempat

Melalui bantuan *software IBM SPSS statistic version 25* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Koefisien Regresi	$R_{xy}$	$R^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	403.794,477			0,000	8,088	
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_4$ )	0,006	0,327	0,107	0,000	3,838	Signifikan

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Hasil analisis regresi linier sederhana seperti pada tabel 5.5 maka persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 403.729,477 + 0,006X_4$$

Nilai konstanta sebesar 403.729,477, hal ini bermakna bahwa Belanja Modal akan sebesar 403.729,477 jika Pertumbuhan Ekonomi sama dengan nol. Koefisien regresi sebesar 0,006, menunjukkan bahwa apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,006 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pertumbuhan Ekonomi ( $X_4$ ) mempunyai pengaruh Negatif terhadap Belanja Modal ( $Y$ ), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,327 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_4y}$ ) sebesar 0,107 yang berarti 10,7% memiliki nilai pada variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan sisannya 89,3% dipengaruhi

oleh variabel lain dan faktor lain selain Pertumbuhan Ekonomi. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}$  3,838 >  $t_{tabel}$  1,980 menunjukkan bahwa Belanja Pegawai ( $X_2$ ) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal adalah negatif tetapi signifikan. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana tersebut, maka hipotesis keempat yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019” tidak dapat diterima/ ditolak.

### 4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda

#### 4.3.2.1 Uji Hipotesis Kelima

Melalui bantuan *software* IBM SPSS *statistic version 25* diperoleh rangkuman hasil analisis regresi linier berganda seperti pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal

Variabel Independen	Koefisien Regresi	$R_{y(123)}$	$R^2_{y(123)}$	Sig	$F_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	92.631,245	0,895	0,801	0,000	120,729	Signifikan
Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )	0,260					
Dana Perimbangan ( $X_2$ )	0,094					
Belanja Pegawai ( $X_3$ )	0,140					
Pertumbuhan Ekonomi ( $X_4$ )	-0,01					

Sumber : data sekunder yang diolah

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda pada table 5.6 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independent dan variabel dependen yang dapat dirumuskan dalam rumus sebagai berikut :

$$Y = 92.631,245 + 0,260X_1 + 0,094X_2 + 0,140X_3 - 0,001X_4 + 46.691,289e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 92.631,245 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independent dianggap konstan ( $X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0$ ), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar 92.631,245.
- b. Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,260 yang artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,260 atau 26%.
- c. Koefisien Dana Perimbangan bertambah sebesar 0,094 yang artinya apabila terjadi perubahan Dana Perimbangan sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,094 atau 9,4%.
- d. Koefisien Belanja Pegawai bertambah sebesar 0,140 yang artinya apabila terjadi perubahan Belanja Pegawai sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,140 atau 14%.
- e. Koefisien Pertumbuhan Ekonomi bertambah sebesar -0,001 yang artinya apabila terjadi perubahan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar -0,001 atau -1%.
- f. Standar Deviasi sebesar 46.691,289.

Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang dapat dilihat di atas dengan koefisien korelasi ( $R_{y(123)}$ ) sebesar 0,895, kemudian besarnya koefisien determinasi ( $R^2_{y(123)}$ ) adalah 0,794. Perhitungan hasil statistik ini berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variasi perubahan variabel dependen sebesar 79,4%, sedangkan sisanya 20,6% ( $100\% - 79,4\%$ ) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi.

Hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui  $F_{tabel}$  sebesar 2,45 dan  $F_{hitung}$  sebesar 141,745, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  artinya secara bersama – sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Peimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian model regresi ini menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Oleh sebab itu, disimpulkan hipotesis kelima diterima.

## 4.4 Pembahasan & Interpretasi Hasil Penelitian

### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, hipotesis pertama menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019”, terbukti Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,821 atau 82,1%. Koefisien determinasi ( $r^2_{xy}$ ) sebesar 0,675 atau 67,5% dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  16,801 >  $t_{tabel}$  1,980. Hasil tersebut menunjukkan dengan pengumpulan data yang terdapat pada BAB IV menjelaskan bahawa data pendapatan asli daerah mengalami fluktuatif di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat maka apabila Pendapatan Asli Daerah naik 1% maka Belanja Modal akan naik 1% juga, begitu pula sebaliknya yang berarti penerimaan laba pendapatan daerah berhubungan dengan besarnya sumber pembiayaan yang disalurkan oleh Pemerintah Jawa Barat dalam berhasilnya melaksanakan tugas dalam mengembangkan infrastruktur daerah tersebut serta dengan positifnya pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut dalam mengelolah dana tersebut. Hasil penelitian ini didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah (Tambunan, 2006). Dengan demikian hipotesis pertama dapat diterima.

### 4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada analisis data yang terdapat pada tabel 4.7 hipotesis kedua menyatakan bahwa “Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019”, terbukti yaitu Dana Perimbangan mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 dengan angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,727 atau 72,7%. Koefisien determinasi ( $r^2_{xy}$ ) sebesar 0,528 atau 52,8% dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 maka nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  9,450 >  $t_{tabel}$  1,980. Hasil tersebut menunjukkan dengan pengumpulan data yang terdapat pada BAB IV menjelaskan bahawa data dana perimbangan mengalami fluktuatif di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat maka hasil tersebut menunjukkan apabila Dana Perimbangan naik 1% maka Belanja Modal akan meningkat 1% juga, begitu pula sebaliknya dan hal ini berarti dana transfer dari pusat ke daerah terhadap belanja modal yang disalurkan dapat digunakan dengan benar untuk mengembangkan daerah di Pemerintah Jawa Barat yang daerahnya minim pendapatan hasil daerah itu



sendiri. Menurut PP Nomor 55 tahun 2005 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan adanya Dana perimbangan dapat memberikan dampak terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatimah, Nopiyanti dan Mintoyuwono (2020) yang menyatakan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah. Maka dengan demikian hipotesis kedua dapat diterima.

#### **4.4.3 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan dan terdapat pada tabel 4.8 hipotesis ketiga menyatakan bahwa “Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019”, terbukti yaitu Belanja Pegawai mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.8 dengan melihat persamaan  $y = a + bx_3$  yaitu  $y = -20.536,724 + 0,462X_3$  dimana nilai  $a$  atau konstan sebesar negatif 20.536,724 dan  $b$  sebesar 0,462 tetapi angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,836 atau 83,6%. Koefisien determinasi ( $r^2_{xy}$ ) sebesar 0,699 atau 69,9% dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 maka nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  15,801 >  $t_{tabel}$  1,980. Hasil tersebut menunjukkan dengan pengumpulan data yang terdapat pada BAB IV menjelaskan bahwa data belanja pegawai mengalami penurunan di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat maka sesuai dengan hipotesisnya sehingga hasil tersebut menunjukkan apabila Belanja Pegawai naik 1% maka Belanja Modal akan -1%, begitu pula sebaliknya dan hal ini kemungkinan karena banyaknya pengeluaran untuk pembiayaan pegawai seperti gaji dan uang pensiunan dibandingkan dengan pengeluaran untuk fasilitas belanja modal pada Pemerintahan Jawa Barat. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu (2016) yang menyatakan Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal yang artinya jumlah pegawai pemerintah daerah yang besar merupakan pemicu pembengkaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah. Maka dana yang diperoleh lebih banyak untuk belanja pegawai. Maka dengan demikian hipotesis ketiga dapat diterima.

#### **4.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pada analisis data yang dilakukan pada tabel 4.9 hipotesis keempat menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019”, terbukti yaitu Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 4.9 dengan melihat angka koefisien korelasi ( $r_{xy}$ ) sebesar 0,327 atau 32,7%. Koefisien determinasi ( $r^2_{xy}$ ) sebesar 0,107 atau 10,7% dengan nilai signifikansi sebesar 0,00 maka nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai 0,05. Nilai  $t_{hitung}$  15,801 >  $t_{tabel}$  1,980. Hasil tersebut menunjukkan dengan pengumpulan data

yang terdapat pada BAB IV menjelaskan bahawa data pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuatif di beberapa daerah Provinsi Jawa Barat kerana provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi terbesar di Indonesia sehingga sesuai dengan hipotesisnya maka hasil tersebut terjadi kerana ada nya faktor-faktor produksi tertentu di daerah tertentu sehingga pembiayaan pengeluaran belanja modal tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi yang terus berjalan. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdiwaty, Zaman dan Kristinawati (2017) yang menyatakan bahawa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan juga teori yang dinyatakan oleh Syahrullah, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut (2014). Maka dengan demikian hipotesis keempat dapat diterima.

#### **4.4.5 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama terhadap Belanja Modal**

Melakukan pengujian dengan uji statistik F yang menguji seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal, membuktikan bahawa hasil pengujian ini secara bersama-sama dari keempat variabel independent berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dengan hasil konstanta  $\alpha$  sebesar 92,631,245; Pendapatan Asli daerah sebesar 0,260; Dana Perimbangan sebesar 0,094; Belanja Pegawai 0,140 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,01 sehingga persamaan regresinya adalah  $Y = 92.631,245 + 0,260X_1 + 0,094X_2 + 0,140X_3 - 0,001X_4 + 46.691,289e$ .

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahawa nilai koefisien  $X_1$  sebesar 0,260 yang berarti Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Belanja Modal sebesar 0,260 dengan asumsi  $X_2$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  tetap. Nilai koefisien  $X_2$  sebesar 0,094 berarti Dana Perimbangan meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Belanja Modal sebesar 0,094 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_3$  dan  $X_4$  tetap. Nilai koefisien  $X_3$  sebesar 0,140 berarti Belanja Pegawai meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Belanja Modal sebesar 0,140 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_4$  tetap. Nilai koefisien  $X_4$  sebesar -0,001 berarti Pertumbuhan Ekonomi meningkat 1 satuan maka akan terjadi perubahan Belanja Modal sebesar -0,001 dengan asumsi  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ .

Melihat dari hasil uji statistik diatas dapat dilihat bahawa pendapatan asli daerah dapat berpengaruh positif dan signifikan oleh belanja modal kerana pendapatan asli daerah apabila meningkat yang berarti sumber pembiayaan daerah yang baik dapat mengakibatkan berjalannya infrastruktur pada daerah tersebut dengan baik, lalu untuk dana perimbangan juga positif yang berarti dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dapat terlaksana dengan baik dalam pembangunan daerah yang tidak dapat dikelola dananya oleh daerah itu sendiri, sedangkan belanja

pegawai juga berpengaruh positif berarti pembiayaan yang dikeluarkan seperti gaji dan uang pensiunan oleh Provinsi Jawa Barat dapat sejalan dengan pembangunan yang di belanjakan dan untuk pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif yang berarti dalam membelanjakan modal di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi tidak terikat atau tidak pengaruh hal tersebut terjadi karena ada faktor-faktor yang lain di daerah tersebut.

koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,895 atau 89,5%. Koefisien determinasi ( $R^2_{y(123)}$ ) sebesar 0,801 atau 80,1%. Hasil pengujian dengan uji signifikansi simultan (uji F) terdapat nilai signifikansi 0,000 lalu nilai  $F_{hitung}$  141,745 >  $F_{tabel}$  2,45 yang berarti secara bersama-sama seluruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prastiwi, Nurlaela dan Chomsatu, (2016) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Maka hipotesis kelima dapat diterima.

#### **4.5 Keterbatasan Penelitian**

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti hanya mengambil 4 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Peneliti menggunakan *software SPSS* yang diharapkan dapat menggunakan *software* lain agar lebih banyak metode yang digunakan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Secara parsial hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019.
2. Secara parsial hasil penelitian Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019.
3. Secara parsial hasil penelitian Belanja Pegawai berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019.
4. Secara parsial hasil penelitian Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan tetapi signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019.
5. Secara Simultan hasil penelitian bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2019.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan cakupan daerah yang ingin diteliti selain di Provinsi Jawa Barat supaya hasil dari penelitian yang akan dilakukan lebih bagus dan banyak
2. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur alokasi belanja pegawai untuk lebih mengutamakan belanja modal karena belanja modal digunakan untuk infrastruktur dan juga pelayanan publik masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas sesuai dengan anggarannya.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan dapat diuji lagi pada variabel belanja pegawai dan pertumbuhan ekonomi karena hasil uji yang dihasilkan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap belanja modal sehingga adanya perbedaan dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013) *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ayem, S. dan Pratama, D. D. (2018) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016,” *Akuntansi Dewantara*, 2(2), hal. 169–182.
- BPS (2015) *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewi, N. W. R. dan Suputra, I. D. G. D. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Accounting Global Journal*, 1(1), hal. 1745–1773.
- Ernayani, R. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013),” *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan)*, 1(1), hal. 43.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2012) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jannah, R., Wahono, B. dan Salim, M. A. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015).,” *Warta Ekonomi*, 07(17), hal. 123–131.
- Karyadi, S. A. (2017) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum Dan Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012,” *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, D. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B. dan Kristinawati, E. (2017) “Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), hal. 43–59.
- Prastiwi, A., Nurlaela, S. dan Chomsatu, Y. (2016) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta,” *Seminar Nasional IENACO-2016*, hal. 872–879. Tersedia pada: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/> (Diakses: 15 Juni 2020).
- Rahman, H. (2005) *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

- Sukirno, S. (2016) *Makroekonomi: teori pengantar*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surakhman, A., Djazuli, A. dan Choiriyah (2019) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang,” *Kolegial*, 14(2), hal. 85.
- Syahrullah, D. (2014) “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-20112,” *Skripsi Univesitas Islam Sunan Kalijaga*, hal. 1–108. Tersedia pada: <http://repository.uinjkt.ac.id> (Diakses: 22 Juni 2021).
- Syukri, M. dan Hinaya (2019) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Of Economic, Management And Accounting*, 2(4), hal. 45–52.
- Todaro (2006) *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Wati, M. R. dan Fajar, C. M. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung,” *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), hal. 63–76.
- Wiraswasta, F., Pudjihardjo, M. dan Adis, P. M. (2018) “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014),” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), hal. 170–180.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Ikawira Subowo  
Alamat : Pondok Bambu Kuning Blok H1A No 8 RT 08  
RW 14 Kec.Bojonggede Kel. Bojonggede Kab.  
Bogor  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 24 Juli 1999  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Bambu Kuning  
• SMP : SMP Citra Nusa  
• SMA : SMAN 4 Cibinong  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 28 September 2021

Peneliti,

(Yudha Ikawira Subowo)

## **LAMPIRAN I**

### Lampiran I

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Belanja Modal



Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

(dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	BELANJA MODAL (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Pegawai (X3)
1	Kab. Kuningan	393,510	229,170	1,374,529	1,271,597
2	Kab. Majalengka	672,132	283,735	1,367,195	1,254,517
3	Kab. Purwakarta	357,890	331,073	923,601	826,887
4	Kab. Subang	479,480	313,886	1,450,713	1,242,451
5	Kab. Sukabumi	508,051	509,484	1,777,394	1,454,191
6	Kab. Sumedang	557,223	327,369	1,269,358	1,155,726
7	Kab. Tasikmalaya	462,706	186,487	1,633,950	1,458,775
8	kab. Bandung Barat	374,320	314,621	1,159,888	971,787
9	Kab. Pangandaran	265,369	64,506	619,657	384,830
10	Kab. Bogor	1,459,647	2,002,209	2,583,489	2,266,711
11	Kab. Cianjur	581,323	454,627	1,729,841	1,359,194
12	Kab. Bekasi	1,165,153	1,843,836	1,620,066	1,481,942
13	Kab. Karawang	631,019	1,056,605	1,623,936	1,518,446
14	Kab. Bandung	708,464	784,216	2,310,509	2,006,100
15	Kab. Garut	578,732	419,201	2,044,981	1,859,584
16	Kab.Ciamis	492,668	180,304	1,342,252	1,149,473
17	Kab. Cirebon	439,768	478,690	1,691,675	1,636,708
18	Kab. Indramayu	713,948	346,871	1,678,667	1,322,053
19	Kota Bandung	1,287,802	1,859,694	1,765,831	2,381,935
20	Kota Bogor	440,919	627,597	814,953	956,968
21	Kota Cirebon	264,561	319,893	773,113	645,708
22	Kota Sukabumi	166,212	276,845	571,878	514,593
23	Kota Tasikmalaya	319,080	242,979	849,187	764,933
24	Kota Cimahi	180,783	268,807	628,232	601,514
25	Kota Banjar	194,774	119,829	428,013	267,708

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

(dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	BELANJA MODAL (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Pegawai (X3)
1	Kab. Kuningan	328,557	253,441	1,717,086	1,315,360
2	Kab. Majalengka	631,758	331,527	1,723,842	1,338,450
3	Kab. Purwakarta	284,796	341,116	1,076,034	815,111
4	Kab. Subang	524,266	360,621	1,833,458	1,315,630
5	Kab. Sukabumi	551,261	548,936	2,210,394	1,367,370
6	Kab. Sumedang	465,362	345,804	1,611,297	1,280,720
7	Kab. Tasikmalaya	737,110	216,226	2,079,587	1,533,400
8	kab. Bandung Barat	355,712	376,221	1,464,280	1,013,750
9	Kab. Pangandaran	220,657	66,385	698,289	422,754
10	Kab. Bogor	1,541,830	2,292,178	2,692,167	2,530,400
11	Kab. Cianjur	616,245	455,156	2,155,472	1,477,770
12	Kab. Bekasi	1,302,250	1,917,814	1,932,029	1,729,850
13	Kab. Karawang	574,175	1,003,391	1,959,377	1,619,920
14	Kab. Bandung	569,468	856,514	2,992,229	569,468
15	Kab. Garut	597,238	385,312	2,470,089	1,799,580
16	Kab.Ciamis	549,753	204,759	1,413,401	1,114,680
17	Kab. Cirebon	610,530	529,050	2,158,779	1,687,840
18	Kab. Indramayu	937,844	351,176	2,066,811	1,353,900
19	Kota Bandung	1,254,020	2,152,758	2,443,767	2,540,340
20	Kota Bogor	552,485	783,873	1,097,615	1,044,030
21	Kota Cirebon	297,984	363,118	870,838	663,015
22	Kota Sukabumi	205,502	295,257	702,120	538,639
23	Kota Tasikmalaya	387,626	254,532	1,077,545	802,727
24	Kota Cimahi	275,140	286,050	783,781	648,444
25	Kota Banjar	281,994	116,321	559,043	342,652

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

(dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	BELANJA MODAL (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Pegawai (X3)
1	Kab. Kuningan	327,877	384,398	1,721,906	1,210,028
2	Kab. Majalengka	605,772	513,783	1,689,901	1,246,980
3	Kab. Purwakarta	416,588	472,480	1,097,350	935,608
4	Kab. Subang	486,430	581,282	1,846,205	1,367,985
5	Kab. Sukabumi	545,840	799,499	1,949,722	1,243,626
6	Kab. Sumedang	498,572	553,257	1,594,548	1,120,921
7	Kab. Tasikmalaya	566,130	401,502	2,083,179	1,462,994
8	kab. Bandung Barat	400,093	609,916	1,587,392	1,088,943
9	Kab. Pangandaran	426,921	83,591	811,595	421,912
10	Kab. Bogor	1,525,152	3,041,872	2,742,839	2,432,862
11	Kab. Cianjur	823,214	535,232	2,201,273	1,441,861
12	Kab. Bekasi	971,090	2,311,805	1,848,535	1,596,795
13	Kab. Karawang	745,196	1,398,309	2,017,808	1,622,374
14	Kab. Bandung	628,497	936,905	3,009,662	2,012,342
15	Kab. Garut	615,046	692,255	2,659,109	1,893,957
16	Kab.Ciamis	452,171	223,076	1,714,552	1,076,967
17	Kab. Cirebon	609,568	779,337	2,074,515	1,626,858
18	Kab. Indramayu	776,090	577,594	1,969,934	1,310,288
19	Kota Bandung	918,875	2,578,457	2,290,752	2,337,929
20	Kota Bogor	433,491	978,197	1,072,486	1,030,115
21	Kota Cirebon	220,222	443,929	819,338	632,947
22	Kota Sukabumi	217,077	359,024	699,677	469,627
23	Kota Tasikmalaya	425,367	354,840	1,114,721	819,612
24	Kota Cimahi	270,324	383,911	820,783	596,846
25	Kota Banjar	215,242	125,454	522,718	279,670

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

(dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	BELANJA MODAL (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Pegawai (X3)
1	Kab. Kuningan	221,662	303,218	1,662,033	1,230,735
2	Kab. Majalengka	681,604	449,974	1,668,010	1,278,366
3	Kab. Purwakarta	228,163	368,851	1,220,987	978,173
4	Kab. Subang	486,207	400,755	1,867,788	1,398,230
5	Kab. Sukabumi	614,381	565,369	1,964,152	1,360,714
6	Kab. Sumedang	410,348	432,181	1,638,676	1,207,726
7	Kab. Tasikmalaya	524,842	248,420	2,067,009	1,458,786
8	kab. Bandung Barat	264,540	422,341	1,525,369	1,137,466
9	Kab. Pangandaran	284,898	111,217	787,754	424,858
10	Kab. Bogor	1,313,835	2,794,660	2,818,814	2,590,630
11	Kab. Cianjur	928,610	569,844	2,246,193	1,419,095
12	Kab. Bekasi	853,621	2,094,369	1,903,321	1,838,786
13	Kab. Karawang	697,603	1,169,569	2,048,785	1,621,732
14	Kab. Bandung	713,093	927,543	3,137,666	2,030,950
15	Kab. Garut	537,593	421,299	2,625,652	1,814,192
16	Kab.Ciamis	442,374	234,610	1,627,548	1,167,699
17	Kab. Cirebon	510,923	584,810	1,709,528	1,481,625
18	Kab. Indramayu	769,879	419,892	1,988,742	1,241,961
19	Kota Bandung	1,049,696	2,571,591	2,427,237	2,537,507
20	Kota Bogor	455,461	912,197	1,066,762	1,108,690
21	Kota Cirebon	175,692	440,436	814,145	625,694
22	Kota Sukabumi	140,100	362,342	688,216	502,263
23	Kota Tasikmalaya	374,596	280,014	1,145,172	789,805
24	Kota Cimahi	276,020	335,016	788,025	659,050
25	Kota Banjar	193,782	116,167	505,143	286,308

Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

(dalam Jutaan rupiah)

NO	KAB/KOTA	BELANJA MODAL (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Belanja Pegawai (X3)
1	Kab. Kuningan	251,909	301,403	1,740,991	1,258,919
2	Kab. Majalengka	643,663	439,843	1,672,256	1,254,285
3	Kab. Purwakarta	329,288	420,353	1,254,756	1,009,252
4	Kab. Subang	458,838	463,310	1,919,000	1,427,018
5	Kab. Sukabumi	603,785	619,788	2,465,721	1,404,959
6	Kab. Sumedang	605,698	463,538	1,742,184	1,237,660
7	Kab. Tasikmalaya	636,907	288,290	2,160,615	1,495,827
8	kab. Bandung Barat	338,001	528,087	1,639,819	1,337,528
9	Kab. Pangandaran	499,054	114,813	864,020	420,161
10	Kab. Bogor	1,567,693	3,161,165	3,094,445	2,683,322
11	Kab. Cianjur	690,653	628,558	2,261,839	1,484,897
12	Kab. Bekasi	954,900	2,439,368	1,892,760	1,914,993
13	Kab. Karawang	703,203	1,356,319	2,138,791	1,710,536
14	Kab. Bandung	1,088,249	1,025,354	3,374,888	2,415,428
15	Kab. Garut	553,083	486,565	2,843,353	1,794,273
16	Kab.Ciamis	520,316	264,280	1,793,455	1,106,301
17	Kab. Cirebon	587,833	638,421	2,193,871	1,525,115
18	Kab. Indramayu	982,685	450,063	2,115,229	1,297,129
19	Kota Bandung	1,179,429	2,548,258	2,484,080	2,535,338
20	Kota Bogor	500,976	1,015,884	1,106,494	1,181,889
21	Kota Cirebon	269,915	434,208	803,587	660,622
22	Kota Sukabumi	192,377	330,946	709,268	539,665
23	Kota Tasikmalaya	445,498	290,971	1,140,745	800,475
24	Kota Cimahi	260,337	360,955	801,160	668,364
25	Kota Banjar	208,991	100,745	504,625	298,547

## **LAMPIRAN II**

### Lampiran II

Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan

## Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015 - 2019

(dalam rupiah)

NO	KAB/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kuningan	12.483.854	13.163.159	13.917.436	14.724.987	15.599.976
2	Kab. Majalengka	14.035.024	14.807.856	15.740.215	16.622.647	17.724.742
3	Kab. Purwakarta	41.123.153	43.068.353	44.776.467	46.511.036	48.071.784
4	Kab. Subang	15.494.277	16.155.833	16.800.362	17.353.374	17.904.497
5	Kab. Sukabumi	15.308.903	16.136.280	17.002.756	17.935.085	18.922.738
6	Kab. Sumedang	16.662.979	17.537.667	18.559.008	19.581.739	20.773.420
7	Kab. Tasikmalaya	11.326.330	11.952.639	12.626.945	13.315.811	14.016.644
8	kab. Bandung Barat	15.641.224	16.334.681	16.999.613	17.751.792	18.470.749
9	Kab. Pangandaran	16.059.844	16.808.674	17.564.343	18.417.681	19.412.058
10	Kab. Bogor	22.801.199	23.581.738	24.420.163	25.373.346	26.296.550
11	Kab. Cianjur	11.298.226	11.986.515	12.646.961	13.411.220	14.128.884
12	Kab. Bekasi	63.447.187	64.041.564	65.200.600	66.636.076	66.965.638
13	Kab. Karawang	58.257.737	61.471.770	64.044.528	67.363.090	69.563.075
14	Kab. Bandung	18.307.706	19.130.404	19.969.224	20.877.715	21.809.417
15	Kab. Garut	12.523.549	13.155.662	13.699.157	14.281.948	14.907.060
16	Kab.Ciamis	15.213.645	16.032.967	16.774.168	17.587.559	18.431.492
17	Kab. Cirebon	12.979.272	13.602.112	14.180.233	14.778.054	15.378.654
18	Kab. Indramayu	33.501.105	33.340.594	33.634.627	33.904.384	34.802.101
19	Kota Bandung	60.278.963	64.733.963	69.197.859	73.924.026	78.808.426
20	Kota Bogor	24.141.686	25.361.680	26.507.616	27.728.664	29.000.138
21	Kota Cirebon	43.152.853	45.338.748	47.532.558	50.012.015	52.653.543
22	Kota Sukabumi	21.958.378	22.982.095	24.029.373	25.158.551	26.346.398
23	Kota Tasikmalaya	18.815.295	20.050.224	21.209.346	22.421.476	23.731.278
24	Kota Cimahi	30.475.708	31.787.016	33.117.890	34.867.095	36.857.695
25	Kota Banjar	14.464.582	15.243.679	16.008.313	16.775.233	17.589.170

**LAMPIRAN III**  
Lampiran III  
Hasil Analisis Regresi



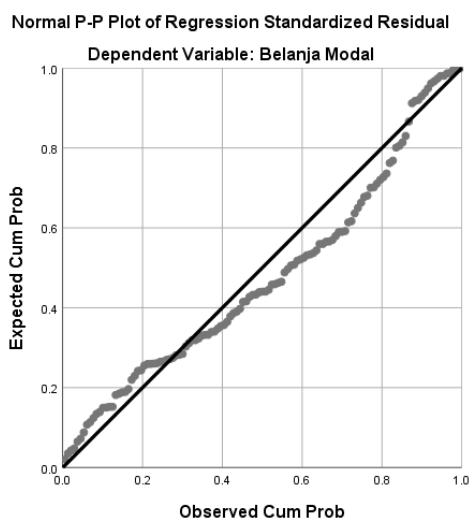
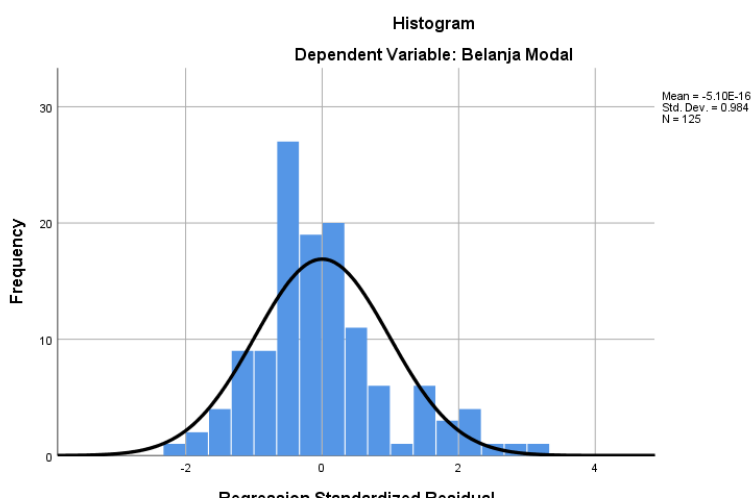
## 1. Statistik Deskriptif

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	125	64506	3161165	686065.16	688395.988
Dana Perimbangan	125	428013	3374888	1635547.34	678186.094
Belanja Pegawai	125	267708	2683322	1268429.78	570750.730
Pertumbuhan Ekonomi	125	11298226	78808426	27113592.35	17286284.059
Belanja Modal	125	140100	1567693	565541.97	315328.603
Valid N (listwise)	125				

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas



### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pendapatan Asli Daerah	.272	125	.000	.704	125	.000
Dana Perimbangan	.086	125	.023	.973	125	.012
Belanja Pegawai	.081	125	.042	.964	125	.002
Pertumbuhan Ekonomi	.220	125	.000	.770	125	.000
Belanja Modal	.146	125	.000	.886	125	.000

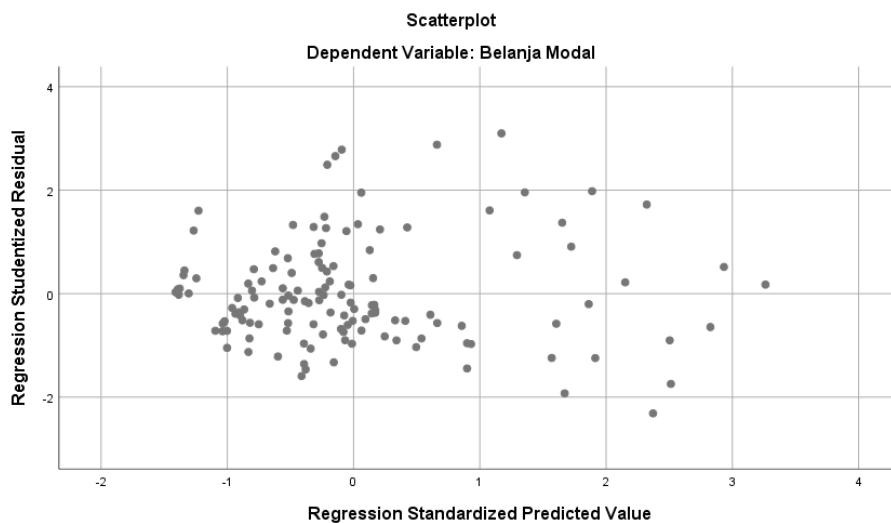
a. Lilliefors Significance Correction

### b. Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	92631.245	46691.289		1.984	.050		
	Pendapatan Asli Daerah	.260	.037	.568	7.112	.000	.260	3.839
	Dana Perimbangan	.094	.043	.203	2.219	.028	.198	5.046
	Belanja Pegawai	.140	.062	.254	2.257	.026	.131	7.627
	Pertumbuhan Ekonomi	-.001	.001	-.076	-1.360	.176	.527	1.896

a. Dependent Variable: Belanja Modal



**c. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.895 <sup>a</sup>	.801	.794	143003.016	2.272

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai

b. Dependent Variable: Belanja Modal

**d. Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	92631.245	46691.289		1.984	.050		
	Pendapatan Asli Daerah	.260	.037	.568	7.112	.000	.260	3.839
	Dana Perimbangan	.094	.043	.203	2.219	.028	.198	5.046
	Belanja Pegawai	.140	.062	.254	2.257	.026	.131	7.627

	Pertumbuhan Ekonomi	-.001	.001	-.076	-1.360	.176	.527	1.896
--	------------------------	-------	------	-------	--------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Belanja Modal

### 3. Regresi Linier Sederhana

#### a. Pendapatan Asli Daerah

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.821 <sup>a</sup>	.675	.672	180621.164

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	307437.729	22854.108		13.452	.000
	Pendapatan Asli Daerah	.376	.024	.821	15.967	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

#### b. Dana Perimbangan

##### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 <sup>a</sup>	.528	.524	217539.621

a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13014.733	50972.865		.255	.799
	Dana Perimbangan	.338	.029	.727	11.728	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

### c. Belanja Pegawai

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 <sup>a</sup>	.699	.697	173577.465

a. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20536.724	37961.803		-.541	.589
	Belanja Pegawai	.462	.027	.836	16.918	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

### d. Pertumbuhan Ekonomi

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.327 <sup>a</sup>	.107	.100	299198.723

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	403794.477	49922.579		8.088	.000
	Pertumbuhan Ekonomi	.006	.002	.327	3.838	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

#### 4. Regresi Linier Berganda Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.895 <sup>a</sup>	.801	.794	143003.016

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9875600340392.578	4	2468900085098.145	120.729	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2453983506113.289	120	20449862550.944		
	Total	12329583846505.867	124			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	92631.245	46691.289		1.984	.050
	Pendapatan Asli Daerah	.260	.037	.568	7.112	.000
	Dana Perimbangan	.094	.043	.203	2.219	.028
	Belanja Pegawai	.140	.062	.254	2.257	.026
	Pertumbuhan Ekonomi	-.001	.001	-.076	-1.360	.176

a. Dependent Variable: Belanja Modal

**5. Menghitung  $t_{\text{tabel}}$** 

$$\begin{aligned} T_{\text{tabel}} &= (\alpha/2 ; n - 4 - 1) \\ &= (0,05/2 ; 125 - 4 - 1) \\ &= (0,025 ; 120) \\ &= 1,980 \end{aligned}$$

**6. Menghitung  $F_{\text{tabel}}$** 

$$\begin{aligned} F_{\text{tabel}} &= (k ; n - k) \\ &= (4 ; 125 - 4) \\ &= (4 ; 121) \\ &= 2,45 \end{aligned}$$